

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA MENENTUKAN SAKSI ADIL
DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN LIMAPULUH DAN
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

M. ARIF PAYAN

NIM: 11421100474

**PROGRAM S 1
JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU - RIAU**

1442 H / 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Upaya Kantor Urusan Agama Menentukan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kecamatan Limapuluh Dan Kecamatan Payung Sekaki"**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Arif Payan

NIM : 11421100474

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP. 19750521 200604 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA
MENENTUKAN SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN
LIMAPULUH DAN KECAMATAN PAYUNG SEKAKI", yang ditulis oleh:

Nama : M. ARIF PAYAN
NIM : 11421100474
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, ME.Sy

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 1986031 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA
MENENTUKAN SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN
LIMAPULUH DAN KECAMATAN PAYUNG SEKAKI", yang ditulis oleh:

Nama : M. ARIF PAYAN
NIM : 11421100474
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, ME.Sy

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Arif Payan (2021) : Upaya Kantor Urusan Agama Menentukan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kecamatan Limapuluh Dan Kecamatan Payung Sekaki

Saksi yang adil merupakan salah satu syarat persaksian dalam keabsahan suatu pernikahan dan kehadirannya mutlak yang diterangkan dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, dimana kriterianya harus diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah dan Penghulu di Kantor Urusan Agama.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya Kantor Urusan Agama menentukan saksi adil dalam pernikahan di kecamatan Limapuluh dan kecamatan Payung Sekaki, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Kantor Urusan Agama menentukan saksi adil dalam pernikahan di kecamatan Limapuluh dan kecamatan Payung Sekaki.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis hukum Islam, yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan (objek penelitian). Lokasi penelitian dilakukan di dua tempat, yaitu Kantor Urusan Agama kecamatan Limapuluh dan kecamatan Payung Sekaki. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 90 orang, sedangkan untuk sampel berjumlah 6 orang dengan teknik *Purposive Sampling*. Sumber data dalam penelitian ini berupa dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari wawancara langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah serta data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi, teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, secara keseluruhan tertuju kepada verifikasi dan pandangan kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Payung Sekaki dalam pemilihan saksi nikah yang adil. Dalam prosesnya pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum sepenuhnya melakukan verifikasi terhadap syarat adil bagi saksi nikah. Penerapan syarat adil yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama tempat dilakukannya penelitian yaitu berlandaskan kepada husnuzan dan adil secara lahiriah yang berdasarkan pada sisi penampilan / fisik seorang saksi dan hal tersebut memang tidak keluar dari koridor hukum islam (fiqih) dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Kantor Urusan Agama Menentukan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kecamatan Limapuluh Dan Kecamatan Payung Sekaki”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat, semoga dengan senantiasa shalawat dan menjalankan sunnahnya kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjalanan yang sangat panjang telah penulisalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. terselesainya penyusunan skripsi ini juga tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

- Kedua orang tua kandung penulis, Ayahanda tercinta H. Yusdiar Payan, S.E bin Payan Sutan Bagindo dan Ibunda tercinta Hj. Erfina binti Bahder Murad yang telah melahirkan dan merawat serta selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis, yang mana jasanya tidak akan pernah terbalaskan oleh diri penulis.
2. Abang kandung penulis Beny Rianto Payan, S.Kom beserta istrinya Laura Sari Herliana Putri, S.Psi dan Kakak kandung penulis Ira Dewi Finanta, S.E beserta suaminya Dede Indra, S.H yang selalu mensupport dan mendoakan penulis, dan juga seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
- Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, S.Ag, M.Ag, selaku Plt. Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
- Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, MA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) dan bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dra. Asmiwati, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang tiada hentinya memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Irvan Zulfikar, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberi masukan, kritikan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

8. Para Bapak dan Ibu Dosen, serta karyawan/ti di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, khususnya di Jurusan/Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal.

Kepala Perpustakaan UIN SUSKA Riau beserta seluruh jajaran Staf yang telah memberikan pelayanan dan berbagai fasilitas literatur dalam penulisan skripsi ini.

Kepala/PPN, Penghulu, serta Staf Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru tempat dilakukannya penelitian yang ikut menjadi ikon penting dan sumber data terpenting dalam penyusunan skripsi ini.

Seluruh teman-teman angkatan 2014 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) yang telah mendampingi dan membantu penulis dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merealisasikan penelitian ini, serta para senior yang selalu memberikan arahan dan para junior yang selalu memberikan dukungan moral.

Seluruh teman-teman di Ikatan Remaja Masjid (IKRAMAS) Sabilul Jannah yang telah memberikan pengalaman dan mengajarkan banyak hal, serta selalu memberikan semangat dan senantiasa mendoakan penulis.

Para sahabat sejak kecil penulis yang sangat luar biasa diantaranya Dwi Cahyo Rammadani, S.Sos, Fadhlurrahman Naufal, S.H, Dwi Sri Astuti Oktaviani, S.KM, Yani Rahmadani Putri, Danny Adiyan Z, S.T, Dian Restia Wulandari dan Riri Kumala Sari, S.H yang selalu memberikan motivasi, support dan doa yang terbaik untuk penulis, serta

14. Seluruh teman, rekan dan kenalan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, semoga Allah memberkahi kawan-kawan semua.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi semoga mendapat imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha penulis, Aamiin ya Rabbal ‘Aalamiin.

Pekanbaru, 18 Juni 2021

UIN SUSKA RIAU

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh	17
B. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI NIKAH	
A. Pengertian Saksi Nikah	27
B. Pendapat Ulama Tentang Saksi Nikah	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Syarat-Syarat Saksi Nikah dalam Hukum Islam (Fiqih)	34
D. Syarat-Syarat Saksi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam	40
E. Teori Keadilan Saksi Nikah	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Verifikasi Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Payung Sekaki	49
B. Penerapan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah dalam Pelaksanaan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Payung Sekaki	51
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah dalam Pelaksanaan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Kecamatan Payung Sekaki	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

LAMPIRAN	65
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	66
----------------------	----

TENTANG PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibangun sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Keluarga yang diciptakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Setiap manusia diberi kodrat oleh Allah untuk hidup berpasangan-pasangan sesuai dengan tuntutan agama yakni, perkawinan. Melalui kodrat itulah manusia dapat menambah keturunan, sehingga menjamin kesinambungan regenerasi keluarga. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S.An-Nur: 32).²

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.10.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2003), h.549.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³

Pernikahan menurut Islam mempunyai suatu nilai ibadah. Maka dari itu perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Dari perkawinan tersebut Allah menciptakan berbagai instrumen khusus, di mana instrumen tersebut adalah sebuah mekanisme dalam pernikahan, instrumen tersebut tiada lain yaitu rukun nikah. Adapun rukun tersebut adalah:

1. Pengantin lelaki (suami)
2. Pengantin Perempuan (istri)
3. Wali
4. Dua orang saksi lelaki
5. Ijab dan kabul (akad nikah).⁴

Rukun nikah di atas adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59

⁴ Al-Hamdani, *Risalah An Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 48

berlaku. Sesuai pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.⁵ Pada ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁶

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan kabul

Dari sekian banyak rukun-rukun dan syarat-syarat salah satu syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah kehadiran saksi, artinya saksi juga merupakan salah satu hal yang penting dan menentukan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam.⁷ Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci dan akan menimbulkan banyak akibat hukum, seperti waris-hewaris, hak asuh anak dan lainnya. Oleh sebab itu, penulis beranggapan jika pernikahan dilangsungkan tanpa adanya saksi yang benar-benar mencukupi syarat sebagai seorang saksi pernikahan akan dikhawatirkan.

⁵Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> (diakses pada 25 Februari 2020, pukul 03.14)

⁶Kompilasi Hukum Islam, Buku I : Hukum Perkawinan, <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> (diakses pada 25 Februari 2020, pukul 03.31)

⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam Bagian Keempat tentang Saksi Nikah Pasal 24 : (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah; (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa ayat dan hadis yang dapat dijadikan dalil pentingnya saksi dalam akad pernikahan, di antaranya:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya : "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...". (Q.S. Al-Baqarah: 282).⁸

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَـ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar". (Q.S. Ath-Thalaq: 2).⁹

Syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah salah satunya kehadiran saksi. Bahwa saksi nikah merupakan orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan. Diutarakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 26 bahwa: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Rasulullah SAW bersabda:

⁸ Departemen Agama RI, op cit, h. 70.

⁹ Ibid, h.945.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi adil”.
(H.R. Ad-Daraquthni dan Ibnu Hibban).¹⁰

Kesaksian dalam suatu akad pernikahan berperan penting dan mempengaruhi sahnya suatu pernikahan. Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia dewasa ini bahwa seorang saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang esensial. Banyak di antara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seorang saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi.

Masalah lainnya adalah penentuan seorang saksi yang akan bersaksi dalam akad nikah itu adalah pihak orang tua dari calon pengantin dimana dalam memilih atau menentukan seorang saksi tidak mempertimbangkan dan memperhatikan secara selektif syarat dan kriterianya. Dan yang lebih memperihatinkan ada sebagian masyarakat yang memilih saksi untuk pernikahan yakni orang-orang yang suka melakukan kemungkaran, seperti mabuk-mabukan dan berjudi.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam hukum perkawinan di Indonesia bagi umat Islam yang bermazhab Syafi’iyyah tidak menerapkan sesuai dengan mazhab yang dianut. Kompilasi Hukum Islam pasal 64 mengatur hal bahwa suatu akad pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka pernikahan tersebut

¹⁰ Ibnu Hibban berkata bahwasanya tidak shahih penyebutan dua orang saksi kecuali dalam hadits ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dicegah oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa pernikahan itu haruslah sesuai rukun dan syaratnya, jika tidak maka seharusnya pernikahan itu dicegah agar tidak melanggar aturan. Namun banyak dari masyarakat bahkan pejabat yang berwenang mengabaikan ketentuan itu dengan berbagai permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas.

Telah dijelaskan dengan tegas mengenai dasar hukum keberadaan saksi dalam akad nikah yang diatur dalam al-Qur'an dan juga hadits. Secara umum dalam akad nikah keberadaan saksi diterima oleh jumhur ulama. Akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sewaktu menjadi saksi nikah terdapat perbedaan pandangan. Secara umum syarat yang harus dimiliki oleh saksi yaitu, baligh (dewasa), berakal dan mukallaf, muslim, berjumlah dua orang atau lebih, kedua saksi orang yang adil bukan fasik, hadir dalam pelaksanaan akad, mendengar dan memahami ijab qabul yang diucapkan dalam akad. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 25, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan adalah syarat adil.

Pada Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dijelaskan mengenai kriteria saksi nikah yang adil, dimana saksi yang adil tersebut belum mempunyai hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun 4 imam Madzhab mempunyai beberapa pendapat mengenai konsepsi saksi yang adil. Menurut peneliti konsepsi dalam beberapa pendapat Imam Madzhab masih belum bisa terealisasi secara penuh dalam pengaplikasiannya. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menimbulkan sebuah dilema dalam pernikahan yang sudah dianggap sempurna atau tidak.

Jika dihubungkan dengan Kantor Urusan Agama yang mempunyai tugas memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan, maka Kantor Urusan Agama harusnya mempunyai landasan yang jelas mengenai standarisasi saksi yang adil, dibuktikananya kejelasan tersebut adalah tentang kefahaman Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki.

Pengawasan dan pencatatan dari Kantor Urusan Agama untuk memeriksa dan meneliti syarat adil bagi saksi serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan tentang halangan perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik menurut hukum syara' (hukum munakahat) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Menurut penulis, pihak Kantor Urusan Agama di tempat dilakukannya penelitian belum sepenuhnya melakukan verifikasi atau pemeriksaan syarat adil bagi saksi nikah, dan juga belum memprioritaskan syarat adil tersebut. Syarat adil bagi saksi nikah dalam beberapa pendapat imam mazhab dan di dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum terealisasi secara penuh dalam pengaplikasiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji mengenai upaya kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan kecamatan Payung Sekaki dalam pengklasifikasian saksi yang dianggap adil dalam akad pernikahan. Hal ini dikarenakan peran

¹¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang kepala Kantor Urusan Agama yang termasuk penting dalam sebuah pernikahan. Maka dari itu penulis tergerak melakukan penelitian dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“Upaya Kantor Urusan Agama Menentukan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kecamatan Limapuluh dan Kecamatan Payung Sekaki”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan penelitian tentang: Upaya Kantor Urusan Agama menentukan saksi adil dalam pernikahan di kecamatan Limapuluh dan kecamatan Payung Sekaki dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa upaya Kantor Urusan Agama menentukan saksi adil dalam pernikahan di kecamatan Limapuluh dan kecamatan Payung Sekaki?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Kantor Urusan Agama menentukan saksi adil dalam pernikahan di kecamatan Limapuluh dan kecamatan Payung Sekaki?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di harapkan dalam kegiatan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Kantor Urusan Agama kecamatan Limapuluh dan kecamatan Payung Sekaki menentukan saksi adil dalam pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui pendapat kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Limapuluh dan kecamatan Payung Sekaki dalam menentukan keadilan saksi di pernikahan.

E Metode Penelitian

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹² maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung. Jenis penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala dan beberapa staf Kantor Urusan Agama di Kecamatan Limapuluh dan Kecamatan Payung Sekaki. Penelitian ini tergolong pada penelitian cara wawancara.

2. Sumber Data

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 194.

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data yang diteliti bersumber dari data Sekunder yang didalamnya bersumber dari Data Primer dan data Sekunder.

- a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada Kepala KUA / Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini.

- b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup hasil wawancara melalui staf atau penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Payung Sekaki. Selain itu juga melalui dokumen-dokumen resmi seperti Kompilasi Hukum Islam, buku-buku atau kitab Kuning, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

- b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

¹⁴ Ibid, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna dalam satu topik tertentu.¹⁵ Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.¹⁶

Dalam peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang bebas terpimpin, artinya dimana pertanyaan tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pokok bahasan yang ada.

Interview (wawancara) dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengungkapkan sebagian besar pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Payung Sekaki terhadap konsep dan verifikasi saksi yang adil dalam akad pernikahan.

c. Dokumentasi

Yaitu segala sumber data yang tertulis dalam penelitian serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian yang dapat membantu penelitian ini.

4. Metode Analisa Data

a. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh dan terkumpul yakni hasil wawancara dari Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Limapuluh dan kecamatan Payung Sekaki. Kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data dan kejelasan

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70

¹⁶ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesesuaian makna serta relevansinya dengan rumusan masalah.¹⁷

Sehingga dapat menjawab pertanyaan yang mendukung dalam penelitian.

b. Klasifikasi

Adalah mengklasifikasikan sumber data-data berdasarkan permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti antara lain data yang telah terkumpul dikelompokkan kembali berdasarkan fokus penelitian pandangan dan proses verifikasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Payung Sekaki terhadap saksi yang adil dalam akad pernikahan.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan pengelompokan data dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki melalui literatur-literatur tujuan penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 90 orang yang terdiri dari 12 orang Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah, 23 orang Penghulu, 12 orang Petugas Tata Usaha, dan 43 orang Staf Jabatan Fungsional Umum Administrasi Nikah pada 12 Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Pekanbaru.

b. Sampel

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sampel pada penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah (PPN), 1 orang Penghulu, dan 1 orang Staf Jabatan Fungsional Umum Administrasi Nikah di setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Payung Sekaki yang mengawasi dan mencatat perkawinan, dengan teknik *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan dengan memilih sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi. Setelah itu sampel yang akan dipilih tersebut berdasarkan atas pertimbangan subjektif dari peneliti yang menentukan sendiri informan mana yang dapat dianggap mewakili populasi setelah ditetapkan pengelompokannya.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Gambaran isi penelitian ini diuraikan menjadi V (lima) bab, sehingga penyajian atau bentuk penulisan ini tersusun dan terarah sesuai dengan pembahasannya. Sistematika penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memuat profil dan lokasi Kantor Urusan Agama kecamatan Limapuluh dan Payung Sekaki beserta pengenalan segenap jajaran yang bertugas di kantor tempat penulis meneliti.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI NIKAH

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan. Berisi tentang metode pengklasifikasian saksi serta penentuan keadilan saksi dalam akad nikah melalui beberapa pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Payung sekaki.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup dari penulisan skripsi. Berisi Kesimpulan Dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (MA) Nomor 18 Tahun 1975 telah diatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama di berbagai daerah di Indonesia. Departemen Agama (Depag) tersebut adalah lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap wilayah kecamatan. Kantor tersebut memberikan bimbingan, pelayanan pernikahan dan persoalan agama lainnya.¹⁹

Sebelum adanya lembaga resmi pemerintahan untuk mengurus berbagai kepentingan umat Islam tersebut, terutama yang berhubungan dengan masalah perkawinan, semua kegiatan dilaksanakan di masjid-masjid, di mana pernikahan itu berlangsung atau ditempatkan calon mempelai berada. Adapun yang menjadi petugas pernikahan tersebut adalah para qadhi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di singkat dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat ini

¹⁹ Depag RI, *Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1980), h. 198.

memiliki 12 Kecamatan, dengan demikian maka terdapat 12 Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Pekanbaru. Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Limapuluh, Rumbai, Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail, Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Rumbai Pesisir, dan Payung Sekaki.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, dalam melaksanakan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.²⁰

Penelitian ini dilakukan pada dua tempat Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Pekanbaru, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan

²⁰ Pasal 3 (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Limapuluh dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki. Hal ini berdasarkan atas pertimbangan subjektif dari peneliti yang menentukan sendiri informan mana yang dapat dianggap mewakili Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Pekanbaru.

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh

1. Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh ini berdiri dari sejak tahun 1986 hingga sekarang yang beralamat di Jl. Lokomotif Pekanbaru. Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh sejak dari tahun 1986 telah mengalami sebelas kali pergantian kepala, berikut ini kepala KUA yang pernah menjabat adalah sebagai berikut:²¹

NO	NAMA KEPALA KUA	MASA JABATAN
1	Drs. H. Tarmizi Muhammad	1986 – 1990
2	Drs. H. A. Jalaluddin	1994 – 1998
3	Drs. H. M. Isa	1998 – 2002
4	Drs. H. Damhir	2002 - 2004
5	Drs. H. Abdul Muis	2004 – 2005
6	Drs. Omar Zakar	2005 – 2007
7	H. Yulisman, M. Ag	2007 – 2012
8	H. Syahrman, S. Ag	2012 - 2015
9	H. Asmir, M. Ag	2015 – 2017

²¹ Suhardi, Kepala KUA Kecamatan Limapuluh, Wawancara, 6 July 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	H. Basri Akmal	2017 – 2018
11	H. Suhardi, S. Ag, MA	2018 - Sekarang

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh

Struktur organisasi merupakan gambaran yang skematis yang ditunjukkan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya suatu struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan-hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Limapuluh sebagai berikut:²²

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Limapuluh



²² Sumber: Data Dinding KUA Kecamatan Limapuluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuliani, SH	HONORER	HONORER
	Fitri Trisnawati	Siswanto

3. Mekanisme Kerja Kantor Urusan Agama Kec. Limapuluh

Dalam melaksanakan tugas, KUA Limapuluh dengan jumlah penduduk muslim 23.800 jiwa memiliki standar operasional pelayanan dalam melayani masyarakat, pelayanan tersebut adalah sebagai berikut.²³

No	Jenis Pelayanan	Target Waktu	Pelaksana
1	Pelayanan Nikah		
	A. Melakukan Pendaftaran Nikah	10 Menit	Penghulu dan Staf adm
	B. Melakukan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data calon pengantin, wali nikah sesuai dengan daftar pemeriksaan nikah (model NB)	Sesuai yang di butuhkan	Kepala dan Penghulu
	C. Memberikan bimbingan dan juga nasehat perkawinan kepada calon pengantin	1 Jam	Penyuluh dan Penghulu
	D. Pelaksanaan akad nikah	45 Menit	Kepala dan Penghulu

²³ Sumber: Papan SOP Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	E. Mendapatkan buku nikah (model NA)	20 Menit	Pengolah data
2	Pelayanan Rujuk		
	A. Melakukan pendaftaran rujuk	10 Menit	Penghulu dan Staf adm
	B. Melakukan pemeriksaan rujuk	20 Menit	Kepala dan Penghulu
	C. Pelaksanaan ikrar rujuk	30 Menit	Kepala dan penghulu
	D. Mendapatkan kutipan buku pencatatan rujuk (model RA)	10 Menit	Penghulu dan Staf adm
3	Pelayanan Surat Rekomendasi Nikah	10 Menit	Pengolah data
4	Pelayanan Legalisir Buku Nikah	10 Menit	Petugas TU
5	Pelayanan Duplikat Akta Nikah (model DN)	30 Menit	Penghulu
6	Pelayanan Akta Ikrar Wakaf (AIW)	2 Hari	Kepala dan Penghulu
7	Pelayanan Surat Keterangan Masuk Islam	20 Menit	Petugas TU
8	Pelayanan Surat Rekomendasi Pendirian Masjid	1 Hari	Penyuluh dan Penghulu
9	Pelayanan Mendirikan Madrasah Diniyah	1 Hari	Pengadmin-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			istrasi
10	Pelayanan Manasik Haji	Menye- suaikan	Kepala dan Staf

B. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki

1. Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdiri pada tahun 1988. Sejak berdirinya secara resmi, Kepala KUA di Kecamatan Payung Sekaki telah dijabat oleh beberapa tokoh, yang menurut data hasil dihimpun, ditemukan data para pejabat Kepala KUA dan masa jabatannya, sebagai berikut:²⁴

1. Drs. H. Abd. Jalil periode 1988 - 1989,
2. Drs. Nukman Mukhtar periode 1989 - 1990,
3. Drs. A. Jalaluddin periode 1990 - 1994,
4. H. Ruslan, BA periode 1994 - 2000,
5. Drs. H. Abd. Muis periode 2000 - 2005,
6. Drs. H. Mukhlis Ismail, MM periode 2005 - 2008,
7. H. Idrus, M.Ag periode 2008 - 2010,
8. H. Darwison, MA periode 2010 - 2012,
9. H. Hasmir, MA periode 2012 - 2014,
10. Drs. H. Junaidi Zen periode 2014 - 2017,

²⁴ Sumber: Data KUA kecamatan Payung Sekaki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

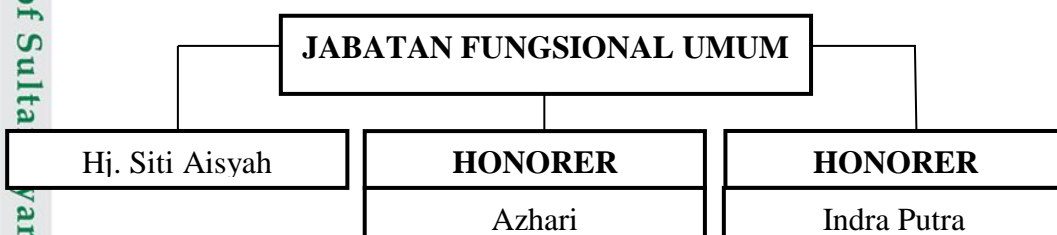
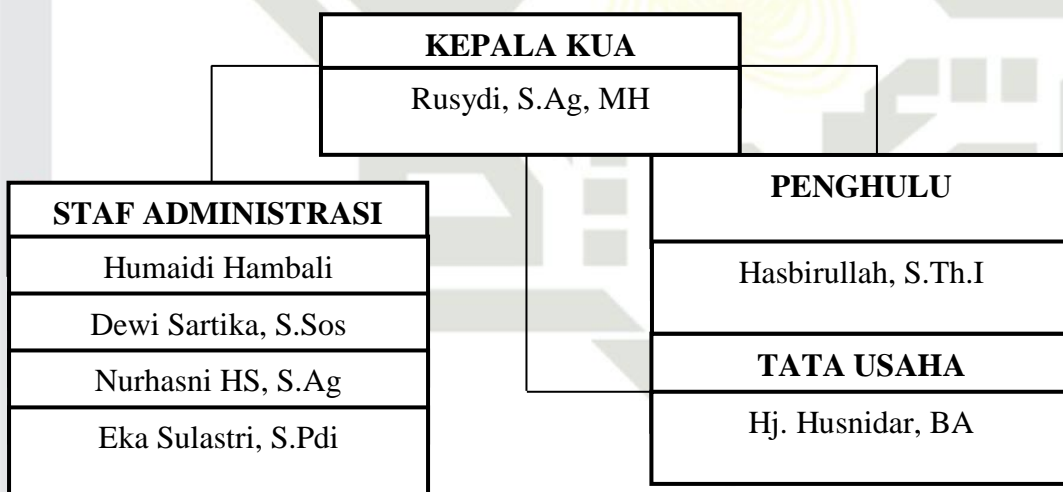
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Rusydi sejak 2017 sampai sekarang

Dengan berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sido rukun Pekanbaru, maka seluruh persoalan yang berkaitan dengan umat Islam ditangani langsung oleh lembaga tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Agama di Tingkat Kecamatan.

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki

Struktur organisasi merupakan suatu aturan yang mengatur pembagian tugas pegawai, sehingga dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Struktur organisasi KUA Kecamatan Payung Sekaki sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mekanisme Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh KUA Payung Sekaki dengan jumlah penduduk muslimnya 161.325 jiwa, ada beberapa standarisasi pelayanan pada KUA tersebut. Adapun standarisasi pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Penanggung Jawab	Keterangan
I	Pelayanan Dalam Organisasi		
1	Pembinaan pegawai dalam pelayanan Pada masyarakat	Kepala KUA / PPN	
2	Membuat laporan bulanan NR	Penghulu	
3	Membuat laporan absensi pegawai	Penghulu	Setiap
4	Membuat laporan bulanan keuangan	Penghulu	Akhir
5	Membuat laporan tahunan / LAKIP	Penghulu/Staf	Bulan
6	Persediaan formulir NR	Penghulu	
7	Agenda surat masuk dan surat keluar	Penghulu	
II	Pelayanan Teknis dan Adm NR		
1	Menerima pendaftaran nikah/rujuk serta memeriksa	Penghulu	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Informasi persyaratan & prosedur nikah/ rujuk dan kelengkapan persyaratan	Penghulu	Diumumkan 10 hari sebelum akad nikah
3	Memberikan bimbingan dan nasehat perkawinan kepada calon pengantin	Penghulu	
4	Pelaksanaan akad nikah	Ka. KUA/PPN dan Penghulu	
5	Penulisan buku nikah	Penghulu dan Petugas TU	Langsung diserahkan setelah akad nikah
6	Membuat rekomendasi nikah	Penghulu/Staf	
7	Membuat duplikat kutipan akta nikah (model N)	Penghulu dan Staf	
8	Menyelesaikan legalisir buku nikah	Penghulu/Staf	1 kali/tahun
III	Pelayanan Keluarga Sakinah		
1	Menentukan desa binaan keluarga Sakinah	Ka. KUA/PPN	
2	Pembinaan keluarga sakinah	Ka. KUA/PPN	
3	Pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat kecamatan	Ka. KUA/PPN	
4	Konsultasi krisis rumah tangga	Penghulu	
IV	Pelayanan Haji, ZIS, Wakaf		
1	Informasi prosedur pendaftaran haji	Ka. KUA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Pelaksanaan pra manasik haji tingkat Kecamatan	Ka. KUA dan Panitia	Selama 11 Hari
3	Pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah	Ka. KUA dan Penghulu	
4	Pendataan tanah wakaf	Penghulu	
5	Pembuatan akta ikrar wakaf	Ka. KUA/ Penghulu	1 kali/tahun
V	Pelayanan Kemasjidan, Madrasah, dan Ibadah Sosial		
1	Pendataan rumah ibadah	Penghulu/Staf	
2	Rekomendasi pendirian masjid	Penghulu/Staf	
3	Informasi data kemasjidan dan organisasi/lembaga keagamaan	Penghulu/Staf	
4	Informasi prosedur pendirian madrasah	Ka. KUA dan Penghulu	
5	Pendataan produk halal	Ka. KUA dan Penghulu	
6	Penentuan arah kiblat	Ka. KUA dan Penghulu	1 kali/tahun
7	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	Ka. KUA dan Penghulu	

8	Pembinaan lembaga-lembaga keagamaan kecamatan	Ka. KUA dan Penghulu	1 kali/tahun
			1 kali/tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI NIKAH

A. Pengertian Saksi Nikah

Saksi dalam bahasa Arab berasal dari شاهد atau شاهد kata yang berarti menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri), mengakui dan saksi itu sendiri.²⁵ Orang yang bersaksi memberitahukan apa yang ia saksikan dan ia lihat. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafadz: “aku menyaksikan” atau “aku telah menyaksikan”.²⁶

Saksi dalam bahasa Indonesia berarti orang yang melihat atau mengetahui. Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh sungguh terjadi.²⁷

Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu berkumpul atau bergabung,²⁸ dan bersetubuh atau bersenggama.²⁹ Menurut istilah fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz “nikah” atau akad yang menghalalkan

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 746.

²⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa oleh Mudzakir, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), cet. ke-20, jilid 14, h. 49.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), Edisi keempat, cet. ke- 1, h. 1205.

²⁸ Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke- 1, h. 174.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, op.cit., h. 1461.

pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan.³⁰

Dengan demikian saksi nikah adalah orang yang melihat, mengetahui atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri akan peristiwa akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan.

B. Pendapat Ulama Tentang Saksi Nikah

1. Kedudukan Saksi Nikah

Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat yang secara khusus menyebutkan tentang saksi nikah, akan tetapi di dalam masalah mu'amalah, talak dan rujuk disebutkan adanya saksi.

Dalam hal untuk membuktikan telah diadakannya suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali, harus pula adanya saksi. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, baik suami maupun istri tidak akan (mudah) dapat mengingkari ikatan perjanjian pernikahan yang suci tersebut.

Berdasarkan qiyas dan tafsiran Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 282 dan surah At-Thalaq [65]: 2, dapat disimpulkan bahwa pernikahan

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Nikah, Talak, dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. ke-1, h. 36-37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu harus disaksikan oleh dua orang saksi. Sebab dalam surah Al-Baqarah [2]: 282 berbunyi:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).”³¹

Imam Abu Hanifah telah mengqiyyaskan persaksian dalam akad pernikahan kepada persaksian dalam akad mu’amalah. Adanya saksi di waktu melaksanakan akad merupakan rukun akad mu’amalah. Karena itu adanya saksi dalam akad pernikahan tentu juga diperlukan.³²

Setelah penjelasan tentang hutang piutang atau muamalah kemudian ayat ke- 282 dari surah Al-Baqarah tersebut menjelaskan tentang persaksian baik dalam tulis menulis maupun lainnya. Ini berarti bahwa saksi yang di maksud adalah benar-benar yang wajar serta di

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 48.

³² Selamat Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi itu adalah saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim.³³

Sedangkan dalam surah At-Thalaq [65]: 2 berbunyi:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.³⁴

Ibnu Juraij mengatakan, adalah Atha’ pernah mengatakan “tidak diperbolehkan dalam pernikahan, perceraian, dan rujuk kecuali dengan menghadirkan saksi yang adil sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah kecuali bila ada uzur”.

Allah berfirman, “Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat”. Berdasarkan ayat ini, imam Syafi’i menegaskan bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika

³³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet. ke- 10, h.

³⁴ Departemen Agama RI, op. cit., h. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkannya ketika hendak memulai pernikahan.³⁵

Menurut jumhur fuqaha, akad pernikahan adalah di antara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi, hukumnya sah menurut syara'. Jumhur mengambil dalil tentang syarat persaksian dalam keabsahan pernikahan dari hadist yang diriwayatkan dari 'Aisyah :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *Tidak (sah) pernikahan, kecuali dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil*". (HR. Ibnu Hibban)³⁶

Persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting sebagai berikut:

- a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur maslahat dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan ke khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.
- b. Persaksian dapat mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan juga untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.

UIN SUSKA RIAU

³⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, jilid 4, h. 547-548.

³⁶ Amir Alaidin Ali, Shahih Ibnu Hibban, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikr, 1996), cet. ke-1, jilid 4, h. 310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, dan haramnya mertua.³⁷

d. Akad suatu pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari.³⁸

Kedudukan saksi adalah suatu hal yang penting dalam akad nikah, hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan posisi saksi tersebut, apakah saksi itu sebagai rukun atau syarat dalam pernikahan. Mayoritas fuqaha, mereka itu ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dan yang masyhur pendapat ulama Hanabilah berpendapat, pengumuman nikah dapat dicapai melalui persaksian dalam akad dan persaksian ini merupakan ukuran minimal dalam pengumuman. Persaksian tidak sah tanpa bukti, tidak sah hingga ada saksi yang hadir pada saat akad nikah meskipun pemberitahuan pernikahan terlaksana dengan cara yang lain.³⁹

Persaksian tidak boleh cacat dan akad menjadi tidak sah tanpa persaksian. Andaikata yang dilakukan hanya sebagai pengiklanan dan pengumuman nikah tanpa persaksian pada akad, maka akadnya rusak. Persaksian ketika berlangsungnya akad menurut mayoritas fuqaha wajib bagi keabsahannya.⁴⁰

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, op. cit., h. 100.

³⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-3, h. 82.

³⁹ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Kaifi, Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, (Solo: Aqam, 2010), cet. ke- 1, h. 432.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, op. cit., h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan imam Malik berpendapat saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (dukhl), sebab rukun nikah menurut imam Malik ada lima, yaitu: wali, mas kawin (akan tetapi tidak disyaratkan menyebutnya dalam akad), suami, istri, dan lafazd akad.⁴¹

Ibnu Rusyd mengemukakan, bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara', maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa ketentuan saksi adalah untuk menguatkan perkawinan, maka mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan.⁴²

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan, karena persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Demikian juga dapat menghindarkan tuduhan atas suami-istri, serta memberikan penjelasan betapa pentingnya pernikahan tersebut.⁴³

2. Waktu Wajib Persaksian

Waktu wajib adanya persaksian dalam suatu pernikahan menurut Jumhur (selain Malikiyah) adalah ketika melakukan proses akad, agar para saksi mendengar ijab dan kabul ketika diucapkan kedua belah pihak

⁴¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. ke-1, h. 222.

⁴² Ibnu Rusyd, Bidayatu'l Mujahtid, alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), cet. ke- 1, jilid 2, h. 384.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, jilid 9, h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melakukan akad. Jika akad tersebut usai tanpa dibarengi persaksian maka pernikahan itu rusak.⁴⁴

Sedangkan menurut Malikiyah, persaksian tidak disyaratkan saat timbulnya akad dan saat berlangsung. Ia wajib dinyatakan saat sebelum bergaul, sedangkan persaksian pada saat berlangsungnya akad adalah sunnah hukumnya. Jika tidak ada saksi sebelum bergaul, akad menjadi rusak dan pergaulan hukumnya maksiat yang diharamkan.⁴⁵

3. Jumlah Saksi Nikah

Tidak sah akad nikah disaksikan seorang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Saksi yang berhubungan dengan permasalahan pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki ditambah dengan dua orang saksi perempuan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah [2] : 282 berbunyi:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”.⁴⁶

Syarat – Syarat Saksi Nikah Dalam Hukum Islam (Fiqh)

⁴⁴ Ibid., h. 75.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, op. cit., h. 105.

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat yaitu sesuatu yang musti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, syarat dirumuskan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i, dan dia berada di luar hukum itu sendiri. Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴⁷

Syarat sah bermakna syarat yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Syarat sah pernikahan adalah ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Salah satu syarat-syarat sahnya suatu pernikahan tersebut adalah akad nikahnya dihadiri para saksi.⁴⁸

Menurut pendapat Hanafiah, bahwa syarat saksi adalah:

- a. Saksi cukup dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua perempuan,
- b. Saksi tidak disyaratkan harus adil,
- c. Saksi harus dari orang merdeka.⁴⁹

Sedangkan syarat saksi nikah menurut imam Syafi'i dan Hanbali

⁴⁷ Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997), Jilid 5, h. 1691.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, op.cit., h. 49.

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Sayafi'i, Hanbali, alih bahasa oleh Masykur A.B., dkk, (Jakarta: Lentera, 2008), cet. ke- 23, h. 313.

berpendapat bahwa syarat saksi adalah:

- a. Dua orang saksi harus laki-laki,
- b. Dua orang saksi harus adil,
- c. Dua orang saksi harus merdeka,
- d. Kesaksian harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran.

Kesaksian orang buta tidak dapat diterima dalam madzhab Syafi'iah, karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat langsung dan mendengarnya. Menurut madzhab selain Syafi'i, apabila saksi-saksi itu buta, maka disyaratkan mereka kenal betul dengan suara orang orang yang melaksanakan akad.⁵⁰

Adapun syarat-syarat saksi nikah dalam hukum Islam tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Islam

Tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir untuk orang muslim.⁵¹

Mayoritas ulama secara mutlak tidak membolehkan di dengar kesaksian yang bukan muslim, apalagi menjadi landasan dalam memutuskan perkara di antara umat Islam. Apabila kita menerima kesaksian mereka berarti kita memberikan kewenangan kepada mereka, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4]: 141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 78.

⁵¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, op. cit, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.”*⁵²

Baligh dan berakal

Baligh dan berakal adalah syarat kesaksian oleh karena itu kesaksian anak kecil tidak diterima, karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu salah satunya mengumumkan dan menghargai prosesi pernikahan. Kemudian tidak diterima kesaksian orang yang terkenal ingatannya yang buruk dan sering lupa maupun salah, karena hilangnya kepercayaan terhadap perkataannya seperti orang dungu dan semisalnya.⁵³

Begitu pula kesaksian orang gila (tidak waras) tidaklah sah untuk suatu acara akad nikah. Karena tujuan persaksian tidak terwujud, yaitu mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa akan datang, ketika ada pengingkaran.⁵⁴

c. Laki-laki

Ahli fiqih dari kalangan Syafi’i dan Hanbali mensyaratkan saksi nikah harus laki-laki. Akad tidak sah kecuali disaksikan dua orang laki-laki. Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan hanya laki-laki untuk bisa menjadi saksi, mereka menganggap bahwa kesaksian dua atau satu laki-laki dan dua perempuan adalah sudah cukup.

Mazhab Hanafi tersebut beralasan berdasarkan firman Allah *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika*

⁵² Departemen Agama RI, op. cit., h. 101.

⁵³ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Kaifi, Ringkasan Fikih Sunnah, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), cet. ke- 1, h. 896.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”.⁵⁵

g. Adil

Keadilan adalah salah satu syarat yang mutlak dalam sebuah kesaksian dan merupakan kelanjutan dari ke-Islam-an. Adil merupakan lambang untuk menjaga agama yang bersumber dari ketakwaan dan kehormatan tanpa dikotori oleh perkara bid'ah. Seorang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu, dan orang yang diragukan asal usulnya. Disaksikan atas akad nikah itu oleh dua orang saksi laki-laki yang adil. Jikalau pernikahan itu berkekurangan dari ini, maka pernikahan itu batal.⁵⁶ Kemudian ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa saksi haruslah orang yang dapat bersifat adil.⁵⁷

e. Berbicara

Menurut imam Abu Hanifah, imam Ahmad, dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, sudah barang tentu seorang saksi dapat berbicara. Apabila ia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan.⁵⁸

f. Melihat

Imam Syafi'i berpendapat apabila seorang laki-laki melihat (sesuatu) dan dia dalam keadaan dapat melihat, kemudian dia bersaksi dan dia dalam keadaan

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke- 3, jilid 3, h. 275.

⁵⁶ Ismail Yakub, Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i, (Jakarta: Victory Agencie, 1982), jilid 7, h. 175.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, op. cit., h. 274.

⁵⁸ Ismail Yakub, op.cit., h. 63.

buta maka saya menerima kesaksiannya karena kesaksiannya itu terjadi waktu ia dapat melihat dan tidak ada alasan untuk menolak kesaksiannya. Apabila dia bersaksi dan dia dalam keadaan buta (tidak dapat melihat) di mana dia berkata: "saya dapat menetapkan sebagaimana saya menetapkan sesuatu dengan suara atau rasa mirip dengan rasa".⁵⁹

Kesaksian orang buta sah jika ia mampu mendengar perkataan kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan.⁶⁰ Oleh sebab itu kesaksian harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Untuk memenuhi persyaratan bersatu majelis dalam arti bersatu tempat secara fisik, karena dengan itu persyaratan al-mu'ayanah dengan arti dapat dilihat secara fisik, dapat dipenuhi.⁶¹

g. Mendengar

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad, baik mengenai isi ataupun maksud dan tujuan dari akad tersebut. Di antara tujuan adanya saksi dalam pernikahan adalah untuk memberitahukan ke khalayak ramai dan pihakpihak tertentu apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah berlangsung.

Maka dari itu tidak mungkin orang tuli bisa memberitahukannya sementara ia sendiri tidak bisa mendengarkan pernyataan masing-masing orang yang berakad.

⁵⁹ Ismail Yakub, Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i, (Jakarta: Victory Agency, 1982), jilid 11, h. 133.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, loc. cit.

⁶¹ Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Iurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Syarat – Syarat Saksi Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif yang diperlukan untuk landasan rujukan setiap keputusan Peradilan Agama dan juga Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang terdiri atas tiga materi hukum yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal).⁶²

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqih menurut jumhur ulama terutama fiqih Syafi'iyah.⁶³ Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tercantum kata adil yang merupakan salah satu syarat yang mesti diperhatikan dalam persaksian suatu perkawinan. Syarat-syarat saksi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 25 dan 26 adalah sebagai berikut:

- a. Muslim,
- b. Laki-laki,
- c. Adil,
- d. Aqil,
- e. Baligh,
- f. Tidak terganggu ingatannya,
- g. Tidak tuna rungu (tuli),
- h. Hadir dan menyaksikan langsung akad nikah,

⁶² Fints Fajar Sadillah, "Hukum Islam: Jurnal For Islamic Law, No. 2", Jurnal Hukum Islam, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2016), h. 905.

⁶³ Amir Syarifudin, op. cit., h. 84.

Serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah berlangsung.⁶⁴

Adapun dalam pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang juga merupakan sumber rujukan oleh Kantor Urusan Agama bahwa akad nikah harus dihadiri dua orang saksi yang memenuhi syarat: laki-laki, beragama Islam, baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil.⁶⁵

Mengenai ketentuan saksi nikah, selama ini terdapat perbantahan pendapat apakah saksi merupakan rukun nikah atau tidak. Untuk menghilangkan perbantahan itu, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menetapkan dua orang saksi sebagai rukun nikah.⁶⁶

Begitu juga halnya jika terdapat perbedaan pendapat mengenai saksi dalam suatu perkawinan yang tidak mensyaratkan adil, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan Kantor Urusan Agama, menetapkan adil sebagai syarat bagi saksi dalam pelaksanaan perkawinan. Kemudian di tambah dengan Peraturan Menteri Agama yang seharusnya memperhatikan dan menerapkan syarat adil bagi saksi.

E. Teori Keadilan Saksi nikah

1. Pengertian Adil

⁶⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 114.

⁶⁵ Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

⁶⁶ Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-5, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adil secara bahasa berarti membetulkan, meluruskan, lurus, sesuatu yang dirasakan lurus dan seimbang.⁶⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil berarti berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.⁶⁸

Sikap seseorang yang adil itu harus selalu betul dan lurus. Lurus di sini adalah kelurusan akidahnya yang mana keadaan hati seseorang yang sesuai dengan syar'i, selalu berbuat dan bertindak sesuai dengan syar'i dan melaksanakan segala amal yang mengandung pahala serta meninggalkan seluruh perbuatan yang mengandung unsur dosa. Dalam arti lain adil bermakna cerdas, maksud cerdas di sini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.⁶⁹

Di kalangan fuqaha adil mempunyai dua makna. Pertama, istiqamah. Adil yang dimaksud adalah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil. Tindakan seseorang yang benar lebih dominan dari kesalahannya, serta menjahui perbuatan-perbuatan hina. Sedangkan secara istilah adil bermakna: orang yang tidak tampak sesuatu yang mencederakan dalam urusan agamanya dan muruah (kehormatannya).

⁶⁷ Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1989), h. 507.

⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 10.

⁶⁹ Zakiah Drajat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid 2, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi seperti ini, adalah adil dalam konteks memberikan kesaksian dan periwayatan hadits. Kedua, bertindak tepat. Adil dengan makna kedua ini sebagai lawan kata aniaya.⁷⁰

Tidak diterima kesaksian dari orang yang terkenal sebagai pendusta, buruk keadaannya, ataupun rusak akhlaknya.⁷¹ Adil juga memiliki arti dapat dipercaya dalam bidang-bidang agama, benar dalam berbicara dan tidak pernah berkata bohong. Hal ini bukan berarti orang yang memiliki sifat adil bebas dari dosa karena tidak ada manusia yang sedemikian terjaga.⁷²

2. Kedudukan Adil dalam Saksi Nikah

Mengenai kedudukan adil sebagai syarat terdapat dua pendapat, pertama, keadilan merupakan syarat, dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa keadilan itu bukan sebagai syarat.

Mazhab Syafi'i tersebut berpendapat adil merupakan syarat, bahwa saksi nikah harus orang yang bersifat adil, artinya bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".⁷³ Begitu juga imam Ahmad mensyaratkan saksi yang diperlukan pada akad nikah adalah dua orang laki-laki yang adil.⁷⁴

⁷⁰ Ariij binti Abdur Rahman As-Sanaan, Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 51.

⁷¹ Abdul Majid dan Arif Mahmudi, op. cit., h. 895

⁷² Abuddin Nata, dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 9-20.

⁷³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Mukhtasbar Kitab Al Umm fi Al Fiqh, alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2, jilid 3, h. 48.

⁷⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, op. cit., h. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut imam Abu Hanifah adil bukan merupakan syarat, bahwa saksi nikah itu tidak harus adil, fasik pun sah, karena fungsi saksi pada hakekatnya adalah i'lan (pengumuman) saja.

Keadilan menurut imam Abu Hanifah cukup dilihat dari keIslamannya secara zahir, dan tidak diketahui dari dirinya apa yang bisa merusak kemuliaan dan kehormatannya.⁷⁵ Beliau memperbolehkan orang orang fasik di angkat menjadi saksi, asal saja kehadirannya dapat mencapai tujuan diadakan saksi dalam akad nikah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat [49] : 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”*.⁷⁶

Ayat di atas menerangkan agar kaum muslimin meneliti berita-berita yang dibawa orang-orang fasik. Berita itu boleh diterima dan diakui apabila terbukti kebenarannya. Demikian pula halnya dengan perkataan, persaksian orang fasik dapat diterima apabila orang fasik itu dapat dipercaya. Selain itu imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya.⁷⁷

⁷⁵ Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, op. cit., h. 56.

⁷⁶ Departemen Agama RI, op. cit., h. 516.

⁷⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatu'l Mujtahid, alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1990), cet. ke-1, jilid 3, h. 684.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut imam Syafi'i fungsi saksi tidak hanya i'lan saja, melainkan juga qobul (dapat diterima secara syar'i), oleh karena itu adil tetap merupakan syarat bagi seorang saksi.⁷⁸ Menurut imam Syafi'i tersebut bahwa persaksian dalam pernikahan itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu. Oleh karenanya ia tetap mensyaratkan keadilan pada diri saksi.⁷⁹

Jikalau disaksikan pernikahan itu oleh orang yang tiada boleh kesaksiannya walaupun mereka itu banyak dari orang-orang merdeka muslim atau kesaksian budak muslim atau kafir dzimmi. Niscaya tidak boleh perkawinan tersebut, sehingga perkawinan itu diadakan dengan dua orang saksi yang adil.⁸⁰

Aliy As'ad mengemukakan bahwa syarat pada dua orang saksi dalam suatu pernikahan adalah merdeka dengan sempurna, jelas sebagai laki-laki dan adil, dan di antara persyaratan keadilan yang harus ada yaitu Islam, baligh berakal, mendengar, bisa berbicara, melihat, karena apa yang akan diterangkan dibelakang bahwa ucapan-ucapan itu tidak bisa ditetapkan adanya kecuali dengan mu'ayanah (terlihat oleh mata) dan terdengar oleh telinga.⁸¹

3. Kriteria Adil Bagi Saksi Nikah

Adapun kriteria adil bagi saksi nikah adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, (Semarang : Duta Grafika, 1989), h. 83.

⁷⁹ Ibnu Rusyd, loc. cit.

⁸⁰ Ismail Yakub, op.cit., 176.

⁸¹ Moh. Tolchah Mansoer, Fat-hul Mu'in, Terj. Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), jilid 3, h. 35-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Seseorang yang kebbaikannya lebih banyak dari pada kejahatannya dan tidak suka melakukan kebohongan. Dalam masalah persaksian, di sini harus diangkat dari orang yang adil, oleh karena itu orang fasik tidak dapat diterima persaksiannya sebab orang fasik tidak akan bisa dipercaya ucapannya, diragukan pula ia mampu menghindar dari dusta.⁸² Orang yang adil itu tidak akan mau berkata bohong sehingga dia tidak menyia-nyiakan amanah yang telah diperintahkan oleh Allah atau melakukan sesuatu yang terlarang.⁸³
- b. Seseorang yang ia saleh dalam beragama dan bersifat muruah. Kesalehan dalam agama terjadi dengan ditunaikannya yang fardhu dan yang sunnah, menjauhi yang diharamkan dan dimakruhkan, serta tidak melakukan dosa besar dan tidak menetap dosa-dosa yang kecil. Sedang muruah ialah hendaknya seseorang melakukan apa yang menghiasi dirinya dan juga meninggalkan apa yang menjelek-jelekkan dirinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.⁸⁴
- c. Seseorang yang selalu istiqomah dan senantiasa berpegang teguh mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara zahir yaitu orang yang keadaanya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindakan kefasikan dan penyelewengan. Imam Syafi'i dan imam Hanbali, pendapat yang lebih shahih menurut mereka menilai keadilan secara

⁸² Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 100.

⁸³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, alih bahasa oleh Ali Nur Medan. dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet. ke-7, jilid 3, 680.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, loc. cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahir. Keadilan saksi tersebut dikenal secara lahir bukan secara batin, seperti dikenal melalui pergaulan. Untuk mengetahui keadilan, saksi tidak dikenal sebagai orang yang fasik (tidak taat). Kata fasik berarti keluar dari jalan yang hak serta kesalihan.

Fuqaha telah sependapat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak diterima, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur [24]: 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".*

Jika saksi dikenal sebagai orang yang fasik, tidak sah akad pernikahannya. Persaksian dalam nikah adalah masalah penghormatan terhadap akad yang agung dan tidak ada penghormatan dari orang yang fasik. Di samping persaksian memiliki faedah makna penyiaran dan pengumuman, ia menetapkan pada pengingkaran. Oleh karena itu, saksi harus dari orang yang patut melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang diterima persaksiannya dan tidak dikenal sebagai orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasik sehingga pernikahan tetap eksis ketika ada perkara di hadapan pengadilan.⁸⁵

Tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Akan tetapi jumhur fuqaha tidak berselisih pendapat bahwa kesaksian orang fasik itu dapat diterima, apabila telah diketahui taubatnya.⁸⁶

Bagi saksi yang tidak diketahui kefasikannya, hal itu cukup dilihat dari lahirnya saja. Apabila setelah akad, saksi itu ternyata orang yang fasik, maka kefasikannya tidak berpengaruh kepada sahnya akad karena syarat keadilan adalah berdasarkan apa yang tampak.⁸⁷

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, loc. cit.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, Ibid., h. 61.

⁸⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, loc. cit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari penjelasan dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Mengenai pandangan dan verifikasi saksi yang adil oleh para informan dalam hal ini Kepala atau Pegawai Pencatat Nikah dan juga Penghulu di dua tempat Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Pekanbaru yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Payung Sekaki, bahwa belum memprioritaskan syarat adil bagi saksi nikah, tetapi para informan tersebut mempunyai cara tersendiri dalam pandangan dan proses verifikasi saksi nikah yang adil.
2. Dikarenakan sulitnya proses verifikasi saksi yang adil demi menjaga perasaan seorang saksi dan memupuk hubungan keharmonisan agar tidak muncul masalah, maka dalam penerapannya membuat Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama menitikberatkan saksi yang adil melalui penampilan yang agamis, serta dengan berhusnuzan kepada semua saksi yang telah diajukan oleh pihak keluarga kedua calon mempelai. Dalam pemenuhan syarat adil pada saksi nikah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama yaitu berupaya dengan mengajak pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan terutama wali dan saksi untuk beristighfar dan bersyahadat.
3. Penerapan syarat adil yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tempat dilakukannya penelitian yang memilih saksi

berdasarkan husnuzan dan penampilan yang agamis memang tidak menyalahi hukum Islam (fiqih) dan juga Kompilasi Hukum Islam.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan pandangannya terhadap saksi yang adil berupa saran dan masukan.

Bagi Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu selain dengan berhusnuzan terhadap saksi yang diajukan oleh pihak keluarga calon mempelai, akan tetapi seharusnya juga melakukan verifikasi atau pemeriksaan tentang keadilan saksi tersebut. Bisa saja dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan seorang saksi seperti menanyakan latar belakang pendidikan agamanya dan sebagainya.

2. Kantor Urusan Agama di Kota Pekanbaru hendaknya membuat standarisasi penunjukan saksi nikah yang adil atau sebuah aturan baku terhadap hukum yang akan dipakai dalam setiap pelaksanaan perkawinan tersebut.

Sebaiknya Kantor Urusan Agama juga melakukan penyuluhan agama tentang kriteria adil bagi seorang saksi nikah. Dalam hal pengajuan saksi oleh pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan, namun juga perlunya penekanan pemahaman oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama kepada pihak keluarga calon mempelai tersebut tentang kewajiban saksi yang adil dalam pernikahan, dan dapat terlaksananya perintah Allah dan Rasul-Nya dan terciptanya suatu pernikahan yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Penulis bersama Kepala KUA
Kecamatan Limapuluh

Dr. H. Suhardi, S.Ag, MA



Penulis bersama Kepala KUA
Kecamatan Payung Sekaki

Rusydi, S.Ag, MA



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke- 5, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Duta Grafika, 1989.
- Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, cet. ke- 1, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Majid dan Arif Mahmudi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, cet. ke- 1, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Abuddin Nata, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu Abdullah Muhammad, *Mukhtasbar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, alih bahasa oleh Amiruddin, Cet. Ke-2, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2013.
- Amir Alaidin Ali, *Shahih Ibnu Hibban*, Cet. Ke-1, Jilid 4, Bairut-Libanon: Dar al-Fikr, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Sindi, Shahih al-Buhari Bihasiyat al-Imam al-Sindi, Beirut: Dar Al- Kotob Al- Ilmiyah, 2012.
- Arrij As-Sanaan, *Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Pusat Bahasa, Edisi keempat, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Gramedia, 2008.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2003.

Eta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A.Abdurrahman, A.Haris Abdullah, Cet. Ke-1, Jilid 2, Semarang: CV. Asy Syifa', 1990.

_____, *Bidayatu'l Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A.Abdurrahman, A.Haris Abdullah, Cet. Ke-1, jilid 3, Semarang: CV. Asy Syifa', 1990.

Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i*, Jilid 7, Jakarta: Victory Agencie, 1982.

_____, *Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i*, Jilid 11, Jakarta: Victory Agencie, 1982.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Ali Nur Medan. dkk, Cet. Ke-7, Jilid 3, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Cet. Ke-10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, Cet ke-5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Ma'ruf Amin. dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Cet. Ke-15, Jakarta: Erlangga, 2011.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Sayafi'i, Hanbali*, alih bahasa oleh Masykur A.B., dkk, Cet. Ke-23 Jakarta: Lentera, 2008.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 2, Al-Qahirah: Dar al-Basyir, 2009.

_____, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan. dkk, Cet. Ke-3, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

_____, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir, Cet. Ke-20, Jilid 14, Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Sulaiman Al-Kaifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. Ke-1, Solo: Aqwam, 2010.

Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

_____, *Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997.

Polchah Mansoer, *Fat-hul Mu'in*, Terj. Aliy As'ad, jilid 3, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

_____, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk, cet. ke-1, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.